

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal dengan jumlah penduduk yang terus bertambah tiap tahunnya. Berdasarkan data Departemen Perdagangan AS, melalui sensus penduduknya, pada tahun 2014 Indonesia berada di posisi ke-4 dari peringkat negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Total jumlah penduduk Indonesia mencapai 253,60 juta jiwa. China menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk mencapai 1,355 miliar. Berada di nomor dua yaitu India yang memiliki jumlah penduduk yang tak kalah dengan China yakni mencapai 1,236 miliar. Selanjutnya di posisi ketiga yaitu AS dengan jumlah mencapai 318.892 juta. Selain jumlah penduduk yang terus bertambah, Indonesia juga terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Indonesia menjadi tempat persinggahan untuk para pedagang, eksportir, importir, dan para perantara perdagangan dari luar negeri yang akan melaksanakan kegiatan ekonominya di Benua Asia menuju ke Benua Australia atau sebaliknya.

Letak geografisnya yang strategis, sehingga Indonesia memiliki potensi ancaman yang kedepannya akan semakin kompleks. Sementara itu, di sisi lain stabilitas keamanan nasional belum kuat. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini makin bersifat multi dimensional seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi,

informasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, Indonesia diharuskan untuk dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI (2007), terdapat enam faktor yang mempengaruhi pertahanan nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pertahanan yaitu: (1) anggaran pertahanan; (2) jumlah penduduk suatu negara; (3) ancaman konvensional dan non konvensional; (4) anggaran pertahanan negara lain; (5) kemampuan keuangan pemerintah; (6) harga alutsista; dan (7) jumlah personil sistem pertahanan.

Dalam UUD 1945 mengatakan bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha -usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha -usaha perdamaian dunia.

Berdasarkan data Internasional Maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001 dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia “Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21”, terdapat 213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia dan kawasan Samudera Hindia, 91 kasus diantaranya terjadi di perairan Indonesia. Namun data pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh TNI-AL, menyatakan bahwa selama tahun 2001 terjadi

61 kasus yang murni dikategorikan sebagai aksi pembajakan dan perompakan dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Dari data yang dirilis kedua institusi diatas, terdapat perbedaan angka, namun data tersebut menunjukkan bahwa keamanan perairan Indonesia pada dekade terakhir memiliki ancaman dan gangguan keamanan yang cukup serius dan perlu penanganan secepat mungkin.

Selain isu diatas, isu perbatasan antar negara juga menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste. Misalnya saja masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yaitu penentuan batas maritim Indonesia -Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.

**Gambar1.1 :**

**Perbatasan laut Indonesia dengan 10 Negara tetangga**



Sumber : [www.batasnegara.com](http://www.batasnegara.com)

Terorisme merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, bahkan menjadi ancaman bagi demokrasi dan masyarakat sipil (*civil society*). Sejak tahun 1999 hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan teror di Indonesia cukup meningkat. (Buku Putih Pertahanan Indonesia : 2003)

Sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia antara lain :

- Peledakan Toserba Ramayana Jakarta, tanggal 2 Januari 1999.
- Peledakan Mal kelapa Gading Jakarta, tanggal 9 Februari 1999.
- Peledakan Plaza Hayam Wuruk Jakarta, tanggal 15 April 1999.
- Peledakan mesjid Istiqlal tahun 1999 yang menghancurkan sejumlah ruangan dan fasilitas lainnya di mesjid tersebut.
- Peledakan Gereja (GKPI) di Medan tanggal 28 Mei 2000, dan Gereja Khatolik, Jalan Pemuda Medan, tanggal 29 Mei 2000.
- Peledakan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, tanggal 4 Juli 2000.
- Peledakan kantor Komisi Pemilu (KPU) Jakarta, tanggal 1 Juli 2000.
- Peledakan di halaman Kedutaan Besar Filipina, tanggal 1 Agustus 2000 yang menewaskan 2 orang, 22 orang luka berat, serta kerugian materiel antara lain menghancurkan 29 kendaraan.
- Peledakan di depan kantor Departemen Pertanian tanggal 30 Agustus 2000, menghancurkan 1 buah bus penumpang. menghancurkan 1 buah bus penumpang.

- Peledakan gedung Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000 yang menewaskan 15 orang, serta 37 orang luka berat dan menghancurkan 81 kendaraan.
- Peledakan gedung Atrium Senen Jakarta, masing-masing tanggal 11 Desember 1998, 1 Agustus 2001 dan 23 September 2001.
- Peledakan sejumlah gedung gereja pada malam Natal tahun 2000 dan 2001.
- Peledakan di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menewaskan lebih dari 200 jiwa dan korban luka berat WNA dan WNI, serta kerugian harta benda.
- Peledakan Mc Donald, Mal Ratu Indah di Makasar tanggal 5 Desember 2002 yang menewaskan 3 orang.
- Peledakan Wisma Bhayangkari di Kompleks Mabes Polri -Jakarta Selatan padatangal 3 Februari 2003

Pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Isu-isu keamanan yang mendesak akan dapat diatasi apabila kapasitas dan kemampuan kekuatan pertahanan yakni TNI dan Polri berada pada kondisi yang memadai. Keperluan untuk membangun TNI Polri yang diharapkan, semakin mendesak bila dihadapkan dengan kondisi personel dan materiel TNI yang ada saat ini. Baik kualitas maupun kuantitasnya masih memiliki banyak kekurangan, sementara tuntutan tugas ke depan semakin berat dan kompleks. Demikian pula halnya dengan komponen pertahanan lainnya, yakni Komponen Cadangan dan Pendukung, yang penyiapan dan pengelolaannya hingga saat ini belum memenuhi harapan.

Selain itu, untuk terlaksananya kemampuan pertahanan negara membutuhkan daya dukung anggaran. Pada dasarnya Anggaran merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran militer (atau pengeluaran militer), juga dikenal dengan anggaran pertahanan adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata. Anggaran militer seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain. Anggaran pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat besar untuk negara.

Berdasarkan Stockholm International Peace Research Institute SIPRI dalam jurnal SPEKTRUM Vol.7, No.1 (2010), Pengeluaran belanja militer juga meliputi kekuatan militer dalam masa latihan, dalam masa dilengkapi dengan senjata sampai pada masa diperlukan dalam melakukan operasi militer atau peperangan .

Tujuan dari pengeluaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Hutosait, 2012) . Menurut Adam Smith tugas melindungi masyarakat perlu dilakukan oleh kekuatan pertahanan yang merupakan kewajiban pertama dari negara, selain menyelenggarakan peradilan, dan melaksanakan pekerjaan umum.

Adapun persentase anggaran pertahanan dan populasi di asia tenggara tahun 2012 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 :**  
**Persentase Anggaran Pertahanan Dan Populasi**  
**Di Asia Tenggara Tahun 2012**

Negara		Anggaran Pertahanan (% dari Tota)	Total Populasi (% dari Total)	
<b>Peringkat Anggaran Pertahanan di Asia Tenggara</b>	ASEAN			
	1	Sinagapura	35,74	0,80
	2	Myanmar	21,10	8,31
	3	Vietnam	11,57	14,92
	4	Malaysia	10,48	4,24
	5	Indonesia	8,85	40,84
	6	Muangthai	7,49	11,42
	7	Filipina	3,06	15,82
	8	Brunei Darussalam	1,23	0,07
	9	Kamboja	0,42	2,44
	10	Laos	0,05	1,13
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : D. arfians : 2012 Lampiran Essay Tema No. 2 IDE, UNHAN. Diolah

Dari tabel diatas, Singapuran menempati posisi pertama dan disusul oleh Myanmar di posisi kedua. Sedangkan Indonesia menempati posisi kelima dengan hanya 8,85 % dari total Anggaran Pertahanan. Posisi Indonesia yang strategis dengan jumlah penduduk dan luas wilayah terbesar di ASEAN yaitu 40,84 % dari total populasi bertolak belakang dengan alokasi anggaran pertahanan yang dimiliki. Berbeda dengan Singapura yang total jumlah penduduknya yang hanya sekitar 0.80 % penduduk ASEAN, memiliki anggaran pertahanan paling besar yaitu 35,74 persen dari total keseluruhan anggaran pertahanan di kawasan ASEAN.

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), total pengeluaran militer dunia mencapai 1,735 triliun US\$ pada tahun 2011. Anggaran pertahanan yang dikeluarkan tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing negara. Setiap negara memiliki ancaman yang berbeda-beda. Ancaman merupakan segala bentuk gangguan langsung, tidak langsung, terlihat ataupun tidak terlihat terhadap kedaulatan; basis-basis vital nasional (ekonomi, militer, dan informasi); penduduk; teritorial, ataupun segala bentuk usaha serangan secara konvensional, inkonvensional, maupun asimetrik terhadap suatu bangsa dalam skala nasional (Widodo, 2003).

**Tabel 1.2 :**

**Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (miliar rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Anggaran Pertahanan Berdasarkan Fungsi</b>	13986	12279	20968	47419	72473	81769

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa Anggran belanja pemerintah pusat berdasarjan fungsi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah Anggaran pertahanan berdasarkan fungsi sebesar Rp. 13.968 miliar rupiah. Anggran tersebut terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dan pada tahun 2013 jumlah anggran pertahanan berdasarkan fungsi sebesar Rp. 81.769 miliar rupiah.

Di Indonesia sendiri, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian lain untuk pagu anggaran 2014. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan.

Pengalokasian untuk anggaran pertahanan ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Kedaulatan dan keutuhan NKRI merupakan harga mati, sehingga upaya untuk tetap menjaga negara tetap utuh dan berdaulat menjadi sangat penting. Jadi sangat perlu adanya perhatian khusus kepada anggaran pertahanan untuk tetap menjaga negara agar tetap utuh dan berdaulat.

Dari uraian diatas serta pemikiran diatas maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pertahanan Optimum Di Indonesia Pada Tahun 1999 -2014”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian – uraian tersebut, penulis merumuskan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengeluaran Anggaran Pertahanan di Indonesia
2. Bagaimana pengaruh Kemampuan Keuangan Negara (Anggaran Pendapatan Negara dalam APBN) terhadap Anggaran Pertahanan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Anggaran Pertahanan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh, pertumbuhan ekonomi, Kemampuan keuangan negara ( APBN) dan kepadatan penduduk terhadap pengeluaran anggaran pertahanan optimum di Indonesia pada tahun 1999 – 2014.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan penulis untuk menyelesaikan studi. Menambah pengalaman pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

##### **2. Bagi Instansi Terkait**

Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan tentang anggaran pertahanan.

##### **3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan**

Semakin banyaknya penelitian akan semakin terbuka informasi dan cara efektif dalam mengatasi beberapa masalah terkait pengeluaran anggaran pertahanan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi pedokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat ini akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan satu pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

## **BAB IV. HASIL DAN ANALISA**

Dalam bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik.

## **BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Dalam bab yang terakhir ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari analisa yang dilakukan.